

NEWS ANALYSIS | WIJAYANTO
PENGAMAT POLITIK UNDIP

Kesiapan KPU dan Bawaslu Harus Sesuai Data



187

PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember 2020 bisa menjadi bom atom penularan wabah virus corona Covid-19.

Di mana pilkada berpotensi menjadi klaster penyebaran wabah jika pesta demokrasi dilaksanakan diadakan di saat tren penularan meningkat. Sehingga pilkada ini bisa menjadi skandal demokrasi bunuh diri masalah yang dipelopori pemerintah

dan elit politik.

la memberberkan data survei nasional yang dilakukan SMRC di mana bahaya penularan covid saat pilkada berpotensi terjadi pada dua tahapan yakni masa kampanye dan hari pencoblosan.

Di hari pencoblosan ada satu titik kerumunan orang di tempat pemungutan suara (TPS). Per-TPS maksimal ada 500 pemilih. Total di Indonesia

kisaran 304 ribu.

Sedangkan di Jateng dengan perhitungan daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 15.559.287, ada sebanyak 44.077 TPS.

Pengamat yang juga Direktur Center for Media and Democracy LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) ini

■ KE HALAMAN 7

Kesiapan KPU...

■ DARI HALAMAN 1

menyatakan dengan bukti data empirik yang ada terkait peningkatan kasus corona, tidak ada alasan lagi pelaksanaan pilkada ditunda.

Dengan bukti empirik yang ada, tanda mana lagi yang didustakan. Setiap hari rekor (kasus) baru, grafik penularan corona terus naik," ujarnya.

Komis Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap, ketua partai politik juga optimis dan yakin bisa mengendalikan massa di lapangan. Namun, kata dia, pernyataan itu harus dites dengan data empirik. Apakah masyarakat sudah siap, elite partai sudah siap. Hari ini menyatakan siap, tapi kejadian sebelumnya, deklorasi dengan konser seperti

kejadian di Gorontalo.

Pelaksanaan pilkada, tidak harus dilaksanakan ketika pandemi leryap, paling tidak, dilaksanakan ketika tren kasus penularan menurun.

Saat kurva penularan menurun, bisa saja penyelenggara pilkada bisa menerapkan proses dan tahapan pilkada berbeda dengan sebelumnya. Yakni dengan berbagai cara agar pelaksanaan aman dan menekan risiko sekecil mungkin.

Misalnya, dengan pelaksanaan e-voting, kalau perlu tidak ada kampanye konvensional sama sekali. Lantaran kampanye di lapangan dengan model rapat umum berpotensi ada pelanggaran protokol kesehatan.

Pendekatan kampanye menggunakan teknologi untuk menyampaikan gagasan dan visi misi sebuah keniscayaan. Semua kontestan dituntut untuk memaksimalkan teknologi untuk sosialisasi virtual menggunakan media online, media sosial, dan lain-lain.

Survei nasional SMRC pada Maret 2020, menemukan pengguna ponsel di Indonesia mencapai 79 persen, dan total itu mayoritas menggunakan ponsel pintar atau smartphone (73 persen) yang bisa digunakan untuk bisa mengakses berita sosial-politik.

Mimpi saya, untuk melindungi kehidupan warga negara dan keselamatan rakyat, ada solidaritas antarkepala daerah yang sepakat meminta pemerintah menunda pilkada. (mam)